DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN SINJAI

Ira Herawati[1], Fitrawati AB[2], Hermansyah[3]
Magister Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai[1,2,3]
ira.sinjaiku@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of government policy in supporting the development of non-formal education institutions in Sinjai Regency, and to identify the factors that support and hinder the effectiveness of such policy. The study employed a descriptive qualitative approach. The research locations were the Sinjai Regency Education Office and the Malebbi Course and Training Institution (LKP) in Sinjai Regency. Data were collected through direct observation, structured interviews with six key informants, and document review. Data analysis employed a descriptive qualitative model comprising the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The measurement of policy effectiveness referred to four indicators proposed by Mardiasmo (2009), namely target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change.

The findings indicate that the overall effectiveness of government policy toward the development of non-formal education institutions in Sinjai Regency falls under the category of Moderately Effective, with the following details. First, the target accuracy indicator is categorized as Moderately Effective; policy targets have been formally established covering 30 institutions, however the distribution of guidance and support has not been equitable between institutions in urban and remote areas. Second, the timeliness indicator is categorized as Less Effective; there are systematic delays in the implementation of guidance programs averaging 4–8 weeks, and in the disbursement of operational assistance averaging 1–2 months behind the planned schedule. Third, the goal achievement indicator is categorized as Moderately Effective; the number of active institutions increased from 24 to 30, accredited institutions increased from 3 to 11, and the non-formal education participation rate rose from 8.3% to 11.7%. Notably, LKP Malebbi achieved the Effective category with a 40% growth in learners, a 68% employment absorption rate among graduates, and 22% engaged in independent entrepreneurship. Fourth, the tangible change indicator is categorized as Effective; there has been an increase in public trust, improvement in institutional governance, enhancement of instructor competence, and measurable economic impact on learners.

This study recommends the reform of target-setting mechanisms based on differential needs, the addition of technical human resources in the Community Education Section, simplification of bureaucratic procedures for budget disbursement, strengthening of cross-agency coordination, and the replication of the LKP Malebbi management model as a best practice for other non-formal education institutions in Sinjai Regency.

Keywords: Policy Effectiveness; Non Formal Education; Course and Training Institution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai; dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Malebbi Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan enam informan kunci, serta telaah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengukuran efektivitas kebijakan mengacu pada empat indikator menurut Mardiasmo (2009), yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai berada pada kategori Cukup Efektif, dengan rincian sebagai berikut. Pertama, indikator tepat sasaran berada pada kategori *Cukup Efektif*; sasaran kebijakan telah ditetapkan secara formal mencakup 30 lembaga, namun distribusi pembinaan belum merata antara lembaga di wilayah perkotaan dan terpencil. Kedua, indikator tepat waktu berada pada kategori *Kurang Efektif*; terdapat keterlambatan sistematis dalam pelaksanaan program pembinaan rata-rata 4–8 minggu dan pencairan bantuan operasional rata-rata 1–2 bulan dari jadwal yang direncanakan. Ketiga, indikator tercapainya tujuan berada pada kategori *Cukup Efektif*; jumlah lembaga aktif meningkat dari 24 menjadi 30, lembaga terakreditasi meningkat dari 3 menjadi 11, dan angka partisipasi pendidikan nonformal meningkat dari 8,3% menjadi 11,7%. Secara khusus, LKP Malebbi mencapai kategori *Efektif* dengan pertumbuhan peserta didik 40%, tingkat penyerapan alumni di dunia kerja sebesar 68%, dan 22% berwirausaha mandiri. Keempat, indikator perubahan nyata berada pada kategori *Efektif*; terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat, perbaikan tata kelola lembaga, peningkatan kompetensi instruktur, serta dampak ekonomi yang terukur bagi peserta didik.

Penelitian ini merekomendasikan adalah reformasi mekanisme penetapan sasaran berbasis kebutuhan diferensial, penambahan SDM teknis pada Seksi Pendidikan Masyarakat, penyederhanaan prosedur birokrasi pencairan anggaran, penguatan koordinasi lintas OPD, serta replikasi model pengelolaan LKP Malebbi sebagai praktik baik bagi lembaga-lembaga pendidikan nonformal lainnya di Kabupaten Sinjai.

***Kata Kunci*: Efektivitas Kebijakan; Pendidikan Nonformal; Lembaga Kursus dan Pelatihan**.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan belajar, serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendidikan nonformal hadir sebagai alternatif sekaligus pelengkap pendidikan formal yang mampu menjawab kebutuhan belajar masyarakat secara lebih fleksibel, adaptif, dan kontekstual, terutama bagi kelompok yang tidak terlayani secara optimal oleh jalur pendidikan formal (UNESCO, 2015).

Lembaga pendidikan nonformal memiliki fungsi yang sangat vital, terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan, kecakapan hidup, pemberdayaan ekonomi, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pelatihan kerja, serta berbagai bentuk pembelajaran berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam realitasnya, lembaga pendidikan nonformal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan sosial yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan mendukung agenda pembangunan daerah.

Pengangguran merupakan salah satu persoalan utama pembangunan daerah yang berimplikasi luas terhadap kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif administrasi publik, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga indikator efektivitas kebijakan publik dan kapasitas kelembagaan

Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sumber daya manusia (Denhardt & Denhardt, 2015). Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (skill mismatch) menjadikan lembaga pendidikan nonformal seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki posisi strategis sebagai instrumen penguatan keterampilan kerja masyarakat (McGrath, 2012).

Kabupaten Sinjai sebagai salah satu daerah yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan pendidikan yang terus berkembang, juga menghadapi tantangan dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan. Dalam konteks tersebut, lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai memiliki posisi strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama bagi kelompok usia produktif, masyarakat putus sekolah, perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan pendidikan berbasis keterampilan dan pemberdayaan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengembangan lembaga pendidikan nonformal seringkali menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, serta belum optimalnya pembinaan dan evaluasi kebijakan.

Di Kabupaten Sinjai, terdapat 30 lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas 21 PKBM dan 9 LKP. Namun keberadaan lembaga tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan pemerintah yang optimal, antara lain karena keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM pembina, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya strategi pembinaan dan evaluasi (Billett, 2011). Persoalan ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum tentu otomatis menghasilkan pengembangan kelembagaan yang optimal, karena implementasinya dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, sumber daya, komitmen pelaksana, struktur birokrasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian efektivitas kebijakan publik di bidang pendidikan nonformal, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dan pengelola lembaga pendidikan nonformal.

Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas Kebijakan

Efektivitas merupakan konsep penting dalam administrasi publik, manajemen, dan evaluasi kebijakan yang merujuk pada tingkat keberhasilan suatu organisasi, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dethan & Cendana, 2019). Sondang P. Siagian memandang efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana secara sadar untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, efektivitas kebijakan diukur menggunakan empat indikator dari Mardiasmo (2009), yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Dalam kajian administrasi Indonesia, efektivitas juga dipahami sebagai derajat ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sondang P. Siagian, sebagaimana banyak dirujuk dalam literatur administrasi, memandang efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana secara sadar untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi. Meskipun banyak dikutip dalam karya ilmiah Indonesia, definisi ini pada praktiknya tetap menempatkan efektivitas sebagai ukuran ketercapaian tujuan.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, efektivitas kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pengembangan lembaga pendidikan nonformal, baik dari sisi ketepatan sasaran, keberhasilan implementasi, maupun dampaknya terhadap perkembangan lembaga. Untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa indikator dari pendapat (Mardiasmo, 2009). Dalam memperoleh informasi peneliti menggunakan beberapa aspek yang akan dikaji yaitu meliputi: tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata.

Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sementara James E. Anderson menekankan bahwa kebijakan publik bersifat terarah, memiliki tujuan, dan lahir dari proses pemecahan masalah publik. Kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan nonformal dipahami sebagai serangkaian keputusan, program, regulasi, dan dukungan administratif yang ditujukan

Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

untuk menjawab persoalan akses, mutu, relevansi, dan keberlanjutan pendidikan nonformal. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bersifat terarah, memiliki tujuan, dan lahir dari proses pemecahan masalah publik.

Berdasarkan dua pandangan tersebut, kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan nonformal dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan, program, regulasi, pembinaan, serta dukungan administratif dan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menjawab persoalan akses, mutu, relevansi, dan keberlanjutan pendidikan nonformal di masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus utama bukan hanya pada isi kebijakannya, melainkan pada sejauh mana kebijakan itu efektif diimplementasikan untuk mendorong pengembangan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai.

Konsep Pengembangan Lembaga dan Pendidikan Nonformal

Pengembangan lembaga dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas kelembagaan agar mampu menyelenggarakan program yang relevan, memiliki tata kelola yang baik, didukung sumber daya manusia memadai, serta mampu bertahan dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat (Cummings & Worley). Pendidikan nonformal sendiri dipahami sebagai kegiatan pendidikan yang terorganisasi di luar sistem formal, bersifat fleksibel, dan menjadi instrumen penting dalam pembangunan SDM serta pembelajaran sepanjang hayat (UNESCO, 2015; Rogers, 2004). McGrath (2012) menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan nonformal berperan penting dalam menjembatani kesenjangan keterampilan yang menjadi penyebab utama pengangguran struktural di negara berkembang. Thomas G. Cummings dan Christopher G. Worley menempatkan pengembangan organisasi sebagai proses perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan anggotanya melalui intervensi yang berbasis ilmu perilaku. Sementara itu, Association for Talent Development menegaskan bahwa pengembangan organisasi berfokus pada peningkatan kapabilitas organisasi melalui penyelarasan strategi, struktur, manusia, penghargaan, metrik, dan proses manajemen.

Berdasarkan perspektif tersebut, pengembangan lembaga pendidikan nonformal dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas kelembagaan agar lembaga mampu menyelenggarakan program yang relevan, memiliki tata kelola yang baik,

Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

didukung sumber daya manusia yang memadai, serta mampu bertahan dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pengembangan lembaga tidak hanya berarti pertambahan jumlah lembaga, tetapi juga peningkatan kualitas kelembagaan, mutu layanan, dan keberlanjutan program.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan nonformal melalui LKP, PKBM, maupun Balai Latihan Kerja (BLK) berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan peserta (Kusumaninggar, 2017; Hidayat, 2016). Namun kajian-kajian tersebut masih didominasi pendekatan evaluatif dan output-oriented, dengan relatif sedikit penelitian yang mengkaji dimensi strategi kelembagaan dan tata kelola kolaboratif antara lembaga pendidikan nonformal, pemerintah daerah, dan dunia usaha (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Kajian empiris yang spesifik mengangkat konteks Kabupaten Sinjai juga belum banyak ditemukan, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan nonformal. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Malebbi Kabupaten Sinjai. Jenis data yang digunakan meliputi data primer (hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung) dan data sekunder (dokumen, laporan, dan referensi pendukung lainnya).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur dengan enam informan kunci yaitu Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Ketua LKP Malebbi, Sekretaris Forum PKBM Kabupaten Sinjai, tenaga pengajar LKP, peserta didik, dan alumni LKP Malebbi, serta telaah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis deskriptif kualitatif Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Efektivitas kebijakan dinilai berdasarkan empat indikator Mardiasmo (2009): tepat sasaran,

Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, yang dianalisis melalui triangulasi sumber data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 819,96 km² dan jumlah penduduk sekitar 247.003 jiwa (BPS, 2023), terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan, dan 67 desa. Kabupaten ini memiliki 30 lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas 21 PKBM dan 9 LKP, dengan 11 lembaga (36,7%) telah terakreditasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menangani pembinaan pendidikan nonformal melalui Seksi Pendidikan Non Formal yang hanya dikelola oleh tiga staf teknis, sehingga intensitas pembinaan terhadap 30 lembaga relatif terbatas. LKP Malebbi, sebagai salah satu lembaga binaan, telah terakreditasi oleh BAN PAUD-PNF dan telah meluluskan lebih dari 297 peserta didik dalam program tata rias pengantin selama enam tahun terakhir.

Efektivitas Kebijakan dalam Dimensi Tepat Sasaran

Sasaran kebijakan pembinaan telah ditetapkan secara formal melalui instrumen hukum, mencakup seluruh 30 lembaga pendidikan nonformal yang terdaftar di Kabupaten Sinjai, dan didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa lembaga seperti LKP Malebbi merasakan relevansi pembinaan yang diterima, namun Sekretaris Forum PKBM mengungkapkan adanya ketidakmerataan distribusi pembinaan, di mana PKBM di wilayah perkotaan cenderung lebih diperhatikan dibanding PKBM di wilayah terpencil yang justru paling membutuhkan dukungan. Berdasarkan triangulasi data, indikator tepat sasaran berada pada kategori Cukup Efektif. Temuan ini sejalan dengan Anderson (2003) bahwa kebijakan publik harus terarah dan memiliki tujuan dalam memecahkan masalah spesifik, serta menegaskan perlunya mekanisme targeting yang mempertimbangkan kebutuhan diferensial antarkelompok sasaran (Denhardt & Denhardt, 2015).

Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Efektivitas Kebijakan dalam Dimensi Tepat Waktu

Dokumen program kerja Dinas Pendidikan tahun 2023 menunjukkan dari 12 kegiatan pembinaan yang direncanakan, hanya 7 kegiatan (58,3%) yang terlaksana tepat waktu. Wawancara dengan Kepala Bidang PAUD dan PNF mengonfirmasi bahwa realisasi pembinaan rata-rata terlambat 4 hingga 8 minggu akibat proses administrasi pencairan anggaran, sementara Ketua LKP Malebbi melaporkan keterlambatan pencairan bantuan dana hingga 1–2 bulan yang berdampak pada keberlangsungan program. Berdasarkan triangulasi data, indikator tepat waktu berada pada kategori Kurang Efektif dan merupakan kelemahan paling signifikan dalam implementasi kebijakan. Dalam perspektif New Public Management, keterlambatan ini mencerminkan kegagalan sistem manajemen kinerja yang belum mengintegrasikan ketepatan waktu sebagai tolok ukur akuntabilitas (Osborne, 2010), sejalan dengan temuan Jaelani dan Sutono (2023) yang mengidentifikasi hambatan birokrasi sebagai faktor kritis dalam implementasi program pelatihan berbasis kompetensi.

Efektivitas Kebijakan dalam Dimensi Tercapainya Tujuan

Data menunjukkan jumlah lembaga aktif meningkat dari 24 lembaga (2022) menjadi 30 lembaga (2025), lembaga terakreditasi meningkat dari 3 menjadi 11 lembaga, dan angka partisipasi pendidikan nonformal meningkat dari 8,3% menjadi 11,7% (BPS Kabupaten Sinjai). LKP Malebbi mencatat pertumbuhan peserta didik sebesar 40%, keberhasilan akreditasi pada 2023, serta penambahan tiga program kursus baru. Berdasarkan triangulasi data, indikator tercapainya tujuan berada pada kategori Cukup Efektif secara keseluruhan, dengan LKP Malebbi mencapai kategori Efektif. Capaian ini selaras dengan temuan Hidayat (2016) dan Kusumaninggar (2017) bahwa lembaga pendidikan nonformal yang mendapat dukungan memadai mampu meningkatkan relevansi program dan dampaknya terhadap peserta didik, sekaligus menjadi bukti bahwa intervensi yang terencana dan sistematis dapat mendorong efektivitas organisasi secara berkelanjutan (Cummings & Worley).

Efektivitas Kebijakan dalam Dimensi Perubahan Nyata

Perubahan nyata tercermin dari meningkatnya kualitas tata kelola lembaga, meningkatnya kompetensi instruktur, serta perubahan persepsi masyarakat yang kini aktif mendaftarkan peserta ke LKP Malebbi karena melihat bukti nyata alumni yang berhasil

membuka usaha mandiri maupun terserap di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dokumentasi LKP Malebbi mencatat 68% lulusan terserap kerja dan 22% berwirausaha mandiri, sementara data BPS menunjukkan peningkatan partisipasi pendidikan nonformal sebesar 15% dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan triangulasi data, indikator perubahan nyata berada pada kategori Efektif dan merupakan dimensi terkuat dalam penelitian ini. Temuan ini mendukung argumentasi McGrath (2012) dan UNESCO (2015) bahwa pendidikan nonformal yang dikelola dengan baik mampu menjadi instrumen efektif pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sejalan dengan temuan Hirshleifer et al. (2014) bahwa pelatihan vokasional berdampak signifikan terhadap employability peserta ketika programnya relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dalam perspektif collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), keberhasilan ini mencerminkan mulai terbentuknya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan nonformal, dan masyarakat, meskipun sinergi tersebut masih perlu dioptimalkan.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Efektivitas Kebijakan

No	Indikator Efektivitas	Dinas Pendidikan	LKP Malebbi	Kesimpulan
1	Tepat Sasaran	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif
2	Tepat Waktu	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif
3	Tercapainya Tujuan	Cukup Efektif	Efektif	Cukup Efektif
4	Perubahan Nyata	Efektif	Efektif	Efektif

(Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026)

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai berada pada kategori Cukup Efektif, dengan satu indikator pada kategori Efektif (perubahan nyata), dua indikator pada kategori Cukup Efektif (tepat sasaran dan tercapainya tujuan), dan satu indikator pada kategori Kurang Efektif (tepat waktu). Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan kontribusi positif yang terukur, namun masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek ketepatan waktu implementasi, pemerataan distribusi pembinaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung efektivitas kebijakan meliputi: (a) ketersediaan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum, mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2020; (b) komitmen pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan lembaga; (c) semangat dan motivasi tinggi pengelola lembaga pendidikan nonformal; serta (d) meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan nonformal.

Adapun faktor penghambat meliputi: (a) keterbatasan anggaran pembinaan yang tidak proporsional dengan kebutuhan; (b) keterbatasan SDM teknis, dengan hanya tiga staf yang membina 30 lembaga; (c) keterlambatan mekanisme birokrasi dalam pencairan anggaran; serta (d) kurangnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama antara Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga program yang dilaksanakan cenderung sektoral dan tidak terintegrasi.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai berada pada kategori Cukup Efektif. Dimensi tepat sasaran dan tercapainya tujuan berada pada kategori Cukup Efektif, dimensi perubahan nyata pada kategori Efektif sebagai capaian terkuat, sementara dimensi tepat waktu menjadi kelemahan paling signifikan dengan kategori Kurang Efektif akibat keterlambatan birokrasi pencairan anggaran. Efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa regulasi yang kuat, komitmen pemerintah, motivasi pengelola lembaga, dan kepercayaan masyarakat, serta faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM teknis, keterlambatan birokrasi, dan lemahnya koordinasi lintas OPD. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi mekanisme penetapan sasaran berbasis kebutuhan diferensial, percepatan prosedur administrasi pencairan anggaran, penambahan SDM teknis pembina, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pengembangan lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Sinjai dapat berjalan lebih optimal dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction (5th ed.). Houghton Mifflin.

Anggraeni, R., Ghofur, A., & Hilal, M. (2023). Efektivitas program Kartu Prakerja dalam membangun sumber daya manusia di masa pandemi Covid-19. Jurnal Administrasi Publik, 14(2), 145–158.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Billett, S. (2011). Vocational education: Purposes, traditions and prospects. Springer.

Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). Public management and governance (2nd ed.). Routledge.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering. Routledge.

Dethan, M. L., & Cendana, W. (2019). Efektivitas program pendidikan dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Jurnal Ilmu Pendidikan, 12(1), 1–10.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.

Hidayat, R. (2016). Pelatihan life skills montir otomotif pada pendidikan nonformal dalam meningkatkan pendapatan warga belajar. Jurnal Pendidikan Nonformal, 11(2), 97–110.

Hirshleifer, S., McKenzie, D., Almeida, R., & Ridao-Cano, C. (2014). The impact of vocational training for the unemployed: Experimental evidence from Turkey. IZA Discussion Paper, No. 8059.

Jaelani, M., & Sutono. (2023). Implementasi pelatihan berbasis kompetensi dalam upaya mengurangi pengangguran di Balai Latihan Kerja Kabupaten Gresik. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(2), 134–146.

Kusumaninggar, F. (2017). Pendidikan kecakapan hidup menjahit bagi peningkatan aktivitas wirausaha warga belajar. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 140–150.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.

McGrath, S. (2012). Vocational education and training for development: A policy in need of a theory? International Journal of Educational Development, 32(5), 623–631.

Osborne, S. P. (2010). The new public governance? Routledge.

Rogers, A. (2004). Non-formal education: Flexible schooling or participatory education? Springer.

UNESCO. (2015). Rethinking education: Towards a global common good? UNESCO Publishing.